

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya perusahaan berdiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Perusahaan menggunakan keuntungan yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sehingga perusahaan dapat terus beroperasi. Dalam upaya memperoleh keuntungan tersebut, perusahaan dapat memiliki perbedaan kepentingan dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Perbedaan kepentingan ini dapat berupa penetapan keuntungan yang tidak setara dengan kemampuan manajemen atau menetapkan kebijakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. *Corporate fraud* terjadi ketika perusahaan atau karyawan melakukan tindakan ilegal yang dapat merugikan perusahaan atau pihak yang berkepentingan baik secara materiil dan/atau immaterial (Chen, 2021). Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia 2019, persentase kerugian akibat *fraud* berdasarkan jenis organisasi dialami oleh perusahaan BUMN dan swasta dengan kisaran kerugian mulai dari Rp >10 Juta – Rp 10 Miliar. Nilai kerugian tersebut jika tidak mendapat perhatian khusus akan menyebabkan akumulasi kerugian ratusan juta hingga puluhan miliar. Dalam banyak kasus *corporate fraud*, uang yang telah diambil tidak dapat dikembalikan oleh pelaku.

Jenis *corporate fraud* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *financial statement fraud*. Laporan keuangan merupakan laporan yang umum digunakan oleh pihak perusahaan dan pihak eksternal saat ingin mengevaluasi kinerja keuangan.

Laporan keuangan sangatlah penting bagi pihak perusahaan maupun pihak eksternal karena memiliki berbagai elemen penting yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang dapat menyajikan informasi yang akurat dan kredibel sehingga kedua pihak dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat. Laporan keuangan yang akurat dan kredibel adalah laporan yang dapat memberikan informasi lengkap, jelas dan tepat atas seluruh aktivitas keuangan suatu perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi salah satu alat utama pihak manajemen untuk mencerminkan kinerja keuangan yang dapat memuaskan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Laporan keuangan sebagai alat yang dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan keuangannya, sangat rentan terhadap salah saji material. Salah saji material dibagi menjadi dua yaitu kecurangan (*fraud*) dan kesalahan (*error*). Indikasi yang dapat membedakan kecurangan dan kesalahan terletak pada tindakan yang mendasari salah saji laporan keuangan tersebut, apakah salah saji tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja (SA 240). Salah saji terkait kecurangan dipandang lebih serius dibandingkan kesalahan, hal ini dikarenakan kecurangan menunjukkan adanya ketidakjujuran dan keandalan dari manajemen ataupun orang lain yang terlibat di dalamnya (Jusup, 2014).

Beberapa tahun terakhir beberapa berita kecurangan laporan keuangan mulai terpublikasi di Indonesia. Salah satu kasus yang peneliti sorot adalah kecurangan laporan keuangan yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Permasalahan

ini terkuak pada saat Garuda Indonesia melaksanakan RUPST mereka pada tanggal 24 April 2019. Pada RUPS tersebut, komisaris perusahaan Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tahunan 2018. Penolakan tersebut dilandasi permasalahan pencatatan laba bersih 2018. Diketahui GIAA melakukan pengakuan pendapatan lain-lain sebagai hasil dari piutang kontrak untuk 15 tahun kedepan dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar Rp 3,48 triliun. Permasalahan ini kemudian ditelusuri lebih lanjut oleh OJK, BPK, BEI, hingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Hasilnya PPPK dan OJK menemukan adanya salah saji pada laporan keuangan 2018. Setelah dilakukan penyesuaian GIAA mencatat kerugian sebesar Rp 2,53 triliun dan selisih laba tercatat sebesar Rp 2,6 triliun. Akibat dari kasus ini, OJK memerintahkan perusahaan untuk memperbaiki dan melakukan penyajian kembali laporan tahunan 2018, diikuti dengan *public expose* (Sandria, 2021). Selain itu OJK juga memberikan sanksi administratif kepada GIAA dan anggota direksi sebesar Rp 100 juta, sedangkan BEI memberikan sanksi kepada GIAA sebesar Rp 250 juta (Azzura, 2019). Kasus ini dapat menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan adalah salah satu risiko bisnis yang dapat mempengaruhi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti menguji dua faktor yang dapat mempengaruhi *corporate fraud*. Faktor pertama yaitu *evasive shareholder meetings*. RUPS diadakan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk ikut terlibat di dalam perusahaan. Keterlibatan yang dimaksud dapat berupa evaluasi kinerja direksi atau menyetujui laporan tahunan perusahaan. Diadakannya RUPS

ternyata mengundang berbagai respon dari para manajer, salah satunya yaitu mengadakan RUPS bersamaan dengan perusahaan lainnya. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemegang saham individu atau institusional untuk berpartisipasi dalam setiap RUPS, digunakan manajemen untuk menghindari pemegang saham. Tindakan ini dilakukan oleh manajemen dengan menetapkan tanggal, bulan, dan waktu populer dimana perusahaan lain juga menetapkan tanggal, bulan, dan waktu yang sama. Ketika hal ini terjadi manajemen dapat menghindari pemegang saham, potensi ketegangan diantara pemegang saham dan manajemen serta melimitasi pemegang saham individu dan institusional untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan saat RUPS (Gam *et al.*, 2021).

Faktor kedua yaitu *multiple large shareholders* (MLS). Struktur kepemilikan pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengawasan serta keputusan bisnis yang akan diambil. Struktur kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi dan dikuasai oleh satu pemegang saham besar yang biasanya juga merupakan pemegang saham pengendali, akan memunculkan adanya konflik kepentingan diantara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas (Zhao *et al.*, 2021). Konflik kepentingan yang dimaksud yaitu *tunneling*. Tujuan dilakukannya *tunneling* adalah untuk memuaskan kepentingan pribadi pemegang saham pengendali dengan cara menyalurkan aset perusahaan keluar dari perusahaan (Sari dan Sugiharto, 2014). Kegiatan *tunneling* merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas. Selain pemegang saham pengendali, pemegang saham minoritas juga harus mengawasi praktik *fraud* yang mungkin dilakukan oleh manajer. Keberadaan *multiple large shareholders* dapat berperan secara langsung

mengawasi dan membatasi praktik *fraud* yang dapat dilakukan pemegang saham pengendali dan manajer (Zhao *et al.*, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *evasive shareholder meetings* berpengaruh terhadap *corporate fraud* pada perusahaan terdaftar di BEI periode 2017-2021?
2. Apakah *multiple large shareholders* berpengaruh terhadap *corporate fraud* pada perusahaan terdaftar di BEI periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh *evasive shareholder meetings* dan *multiple large shareholders* terhadap *corporate fraud* pada perusahaan terdaftar di BEI periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang pengaruh *evasive shareholder meetings* dan *multiple large shareholders* terhadap *corporate fraud*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan tambahan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktik. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembaca dan peneliti selanjutnya dalam memahami pengaruh *evasive shareholder meetings* dan *multiple large shareholders* terhadap *corporate fraud*. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pemegang saham dan manajemen untuk menjaga dan meningkatkan *good corporate governance* di perusahaan.